

Evaluasi Dampak Kebijakan Pariwisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal

Nurul Istiqomah¹, Siti Atika Rahmi², Inka Nusamuda Pratama³, Rahmad Hidayat⁴

^{1,2}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

³Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Mataram

⁴Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram

istin0677@gmail.com¹, atika rahmi.siti@gmail.com², inka.nusamuda@ummat.ac.id,
rahmad_dayat22@yahoo.com⁴

Abstract

Evaluation of the impact of tourism policies is an analytical process that aims to assess the extent to which implemented tourism policies have achieved the expected goals, especially in improving the economic, social and environmental conditions of lokal communities. This research aims to evaluate the impact of tourism policy on improving the community's economy. The method used includes qualitative analysis with data collection through observation, interviews and documentation studies. The research results show that the Lawata Beach tourist destination has a positive impact on the community's economic growth, including through the creation of new business opportunities and jobs. This is supported by the development of infrastructure and facilities which are continuously being improved by the city government in collaboration with the Tourism Office as the manager. However, the resulting economic improvement has not been distributed optimally. Therefore, this policy needs to be reviewed on an ongoing basis to ensure equal distribution of economic benefits for the entire community and ensure its sustainability in the future.

Keywords:

Policy
Tourist
Economic growth

Abstrak

Evaluasi dampak kebijakan pariwisata merupakan proses analisis yang bertujuan menilai sejauh mana kebijakan pariwisata yang diterapkan telah mencapai tujuan yang diharapkan, terutama dalam meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pariwisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan meliputi analisis kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa destinasi wisata Pantai Lawata memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, antara lain melalui terciptanya peluang usaha baru dan lapangan pekerjaan. Hal ini didukung oleh pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang terus ditingkatkan oleh pemerintah kota bekerja sama dengan Dinas Pariwisata sebagai pengelola. Namun, peningkatan ekonomi yang dihasilkan belum merata secara optimal. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu ditinjau secara berkelanjutan untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat serta menjamin keberlanjutannya di masa depan.

Corresponding Author:

Nurul Istiqomah
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : istin0677@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kebijakan adalah suatu jenis tindakan yang dilaksanakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan bantuan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut guna mencapai tujuan tertentu atau mewujudkan sasaran atau maksud tertentu (Arisa, 2019). Menurut Edward dan Sharkansky (Muadi et al., 2016) kebijakan Negara berarti “apa yang dikatakan dan dilakukan pemerintah, atau tidak dilakukan, itu adalah tujuan atau tujuan dari program pemerintah” (adalah apa yang ditambahkan dan tidak oleh pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah). Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Hidayat et al., 2019).

Pelaksanaan kebijakan negara mencakup berbagai aspek yang didasarkan pada aturan yang berlaku, berfokus pada kepentingan publik dan prospek masa depan, serta menggunakan strategi terbaik untuk menyelesaikan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat luas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan memerlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta evaluasi berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang optimal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Indraningsih, 2019)

Menurut W. Dunn, evaluasi mengandung beberapa unsur yang saling berhubungan, yang masing-masing berkaitan dengan penerapan pada beberapa skala nilai yang berbeda berdasarkan hasil program dan kebijakan. Evaluasi meliputi kesimpulan, klarifikasi, kritik, kepatuhan, dan dimulainya kembali permasalahan (Ii & Pustaka, 2020). Namun Anderson menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan estimasi atau evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai aktivitas fungsional. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan tidak terbatas pada tahap akhir saja, melainkan terjadi pada keseluruhan proses. Sedangkan Menurut ahli sebelumnya, evaluasi dilakukan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” selesai. Ada dua jenis “selesai”: (1) manajemen waktu (mencapai atau melampaui “tenggat waktu”) dan (2) manajemen kerja (“pekerjaan tuntas”) (Permitasari, 2019)

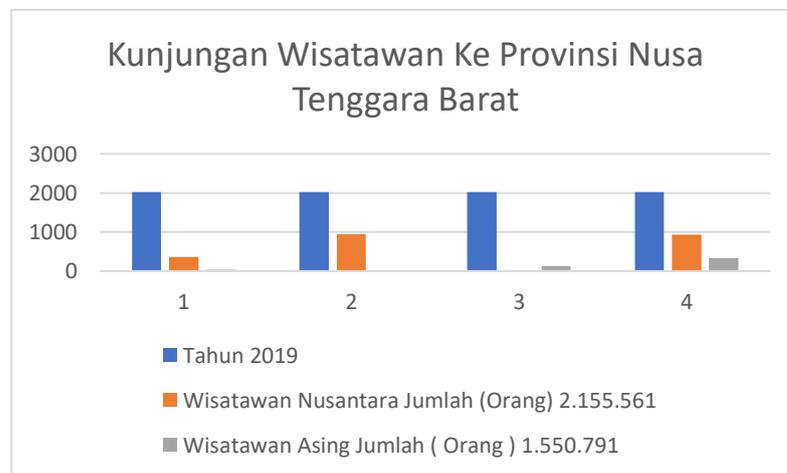
Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak berjalan tanpa pengawasan. Salah satu bentuk pengawasan ini adalah evaluasi kebijakan, yang berfungsi menilai tingkat efektivitas kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, evaluasi bertujuan mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan realitas, menemukan kelemahan, serta mencari solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada (Sukabumi, 2023)Evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang memiliki fungsi penting. Tujuan dari evaluasi adalah untuk membantu memahami maksud kebijakan, cara pelaksanaannya, serta dampak yang dihasilkan. Evaluasi menyediakan informasi yang akurat dan dapat diandalkan untuk pelaksanaan kebijakan di masa mendatang, terutama terkait sejauh mana kebutuhan, nilai, peluang, dan tujuan telah tercapai melalui tindakan pemerintah. Dalam konteks ini, evaluasi menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran tertentu dalam upaya penyelesaian masalah (2022, منار على محمد).

Evaluasi juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai dan mengidentifikasi perbedaan antara harapan dan kenyataan. Terdapat kesamaan konsep antara pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi. Penilaian kebijakan bertujuan untuk mengetahui empat aspek penting dalam suatu kegiatan: (1) proses perumusan kebijakan; (2) pelaksanaan kebijakan; (3) dampak kebijakan; dan (4) efektivitas hasil kebijakan (Anggraeni & Romli, 2024).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah negara yang kaya akan agama dan budaya, yang berkontribusi terhadap beragamnya praktik keagamaan dan budaya. Indonesia mempunyai kondisi geografis yang sangat strategis dan menguntungkan untuk dijadikan sebagai pusat perdagangan pada masa lampau. (Suwandi & Haryati, 2023). Pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan kebijakannya, serta juga diajarkan kepada masyarakat umum yang dekat dengan anggota pariwisata. Berbagai inisiatif harus dipertimbangkan secara matang mengingat keberadaannya dan pengaruhnya terhadap masyarakat luas, namun dari waktu ke waktu, masih banyak potensi wisata yang belum tergali dan dikembangkan. Banyak sekali potensi objek wisata yang memerlukan pertimbangan dan perhatian dari pihak yang berwenang dibidangnya (Arisa, 2019). Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada dasarnya berfokus pada upaya memastikan bahwa sumber daya alam, sosial, dan budaya yang digunakan untuk pengembangan pariwisata saat ini tetap tersedia dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan pariwisata harus memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan, yang berarti bahwa pengembangan harus dapat bertahan secara ekologis dalam jangka panjang, menguntungkan secara ekonomi, serta adil dari segi etika dan sosial bagi masyarakat setempat (Nasional et al., 2006).

Upaya pengembangan pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan proses pembangunan wisata. Pembangunan wisata merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat membawa pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat setempat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Pengembangan destinasi wisata mencakup dua aspek utama, yaitu daya tarik estetika yang memikat dan pemenuhan kebutuhan manusia (Oktaviani & Yuliani, 2023). Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi kehidupan masyarakat setempat. Memahami kehidupan masyarakat, terutama yang masih memegang kuat hukum adat, sangat mempengaruhi penerapan hukum yang ditetapkan pemerintah. Secara geografis, Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas, kaya akan sumber daya alam, serta memiliki keragaman budaya yang unik, yang menjadi aset pariwisata tersebar di seluruh Nusantara. Semua potensi tersebut berpeluang besar untuk meningkatkan devisa negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Mengingat peran pentingnya dalam pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, pariwisata memerlukan konsep serta definisi yang jelas (Rahmi, 2016).

Pada tahun 2019 sekitar 3.706.352 juta wisatawan yang berkunjung ke NTB dengan rincian 2.155.561 juta wisatawan Nusantara dan 1.550.791 juta wisatawan Asing, Dari data tersebut mengalami peningkatan sebelum adanya Covid-19. Setelah pandemik Covid-19 Salah satu sektor industri yang berubah adalah industri pariwisata (Sri Ernawati et al., 2023)



Sumber : Ntb satu data, 2024

Berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung semenjak adanya Covid-19 pada tahun 2020-2021 dikarenakan pemerintah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Sejak saat itu sejumlah tempat wisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Kota Bima sepi, berikut data kunjungan wisatawan di pantai lawata tahun 2020-2023.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik dari Mancanegara terus mengalami peningkatan walaupun di tahun 2021 dengan rincian 186 wisatawan mengalami penurunan, namun wisatawan domestik justru mengalami peningkatan luar biasa sehingga total kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik selama 4 (empat) tahun terakhir sebanyak 556.589 orang. Oleh sebab itu pemerintah Kota berusaha meningkatkan sektor pariwisata di mana salah satunya adalah objek wisata alam serta di perkenalkan sebagai obyek daya tarik wisata alam Kota Bima salah satunya adalah Pantai Lawata.

Nusa Tenggara barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang ibu kotanya terletak di Kota Mataram. Nusa Tenggara Barat memiliki banyak tempat menarik wisatawan untuk berkunjung. Sektor Pariwisata saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai daerah salah satunya di Kota Bima dengan jumlah pengunjung di tahun 2023 di pantai lawata mencapai 128.804 wisatawan di lihat dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima. Data tersebut menunjukkan bahwa destinasi wisata yang terdapat di Kota Bima banyak menarik wisatawan lokal maupun Mancanegara sebelum adanya Covid-19, seperti wisata alam maupun wisata budayanya, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata dan peningkatan wisatawan yang berkunjung (Bima, n.d.) .

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Kebijakan pariwisata yang tepat dapat memberikan dampak positif yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal yang berada di sekitar destinasi wisata. Dalam konteks ini, Pantai Lawata, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bima, memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Namun, efektivitas kebijakan pariwisata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal masih memerlukan kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal.

Serupa ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, ditegaskan bahwa pemerintah daerah mampu untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, yang bertujuan sebagai berikut (Presiden Republik Indonesia, 1945)

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b) Menghapus Kemiskinan
- c) Mengatasi pengangguran
- d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f) Melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Beberapa tempat wisata yang menarik untuk di kunjungi yang berada di Bima seperti, Taman Amahami, Pantai Kolo, Museum Asi Mbojo, Pantai Sori Nehe, Pantai Lariti, Pantai Pink Lambu, Pulau Kelapa, Pantai Tanjung Meriam, Pantai Pasir putih, dan Pantai Lawata. Objek wisata pantai lawata merupakan salah satu tempat wisata yang memiliki daya Tarik tersendiri sehingga banyak wisatawan yang mengunjungi. Pantai Lawata yang berjarak sekitar 5 kilometer dari kota Bima, Pantai Lawata ini dekat dengan kawasan Teluk Bima. Lokasinya terletak di pinggir pintu masuk Kota Bima. Oleh karena itu, pantai ini telah di kunjungi oleh Wisatawan sejak tahun 1961. Adanya destinasi wisata pantai lawata di harapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daerah dan masyarakat setempat sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan

Objek wisata Pantai Lawata harus mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat lainnya karena kawasan Wisata tersebut dapat mencakup nilai ekonomi, sehingga sisi ekonomi dapat dikembangkan sebagai salah satu penggerak utama kesejahteraan daerah dan masyarakat di sekitar Wisata pantai lawata. Adanya Wisata Pantai Lawata menciptakan peluang usaha bagi masyarakat luas dengan menyediakan berbagai kebutuhan wisatawan. Meningkatkan jumlah wisatawan secara langsung dan tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata maka dari itu tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak kebijakan pariwisata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pada penelitian Taufiq Soetanto (2022), menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru telah berjalan cukup baik dilihat dari dampak positifnya yaitu: berupa bangunan fisik, sumber daya dan kondisi ekonomi lokal yang meningkat setiap tahunnya, namun terdapat beberapa dampak yang membuat pelaksanaannya masih belum optimal, khususnya dalam pemanfaatan panggung atraksi, keamanan jalan menuju wisata pemandian alam Banyu Biru dan tidak ada angkutan umum yang menuju ke objek wisata tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata pemandian alam Banyu Biru, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan, dan peningkatan peluang kerja. Namun, perlu adanya perhatian yang lebih baik terhadap aspek lingkungan, pengembangan SDM dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat lokal

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan digunakan penelitian untuk memperoleh data secara valid, akuntabel, maksimal dan menyeluruh serta bertujuan untuk memaparkan bagaimana Evaluasi Dampak kebijakan pariwisata terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat lokal. Penelitian ini telah dilakukan di Destinasi Pantai Lawata bertempat di kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berlangsung pada bulan Desember 2025.

Pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi, di sisi lain, mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis atau rekaman, seperti buku, artikel, laporan, dan arsip, yang dapat memberikan konteks historis serta bukti kuat untuk mendukung analisis. Dengan menggabungkan ketiga metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang topik yang dikaji (Andrayani et al., 2024).

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi Destinasi Pantai Lawata untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap interaksi pelaku usaha, wisatawan, serta perubahan lingkungan sosial dan fisik. Wawancara telah dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat atau terkena dampak kebijakan, seperti para pelaku usaha lokal, pemerintah daerah, wisatawan domestik, pokdarwis, masyarakat sekitar pantai lawata, dan tenaga kerja. Pada saat melakukan wawancara peneliti melakukan kunjungan pertama di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, bertemu langsung dengan kabid Destinasi dan industri pariwisata serta staf Kadis pariwisata, di mana proses wawancara ini berbincang terkait kebijakan apa saja yang di terapkan Dinas Pariwisata dalam pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Pantai Lawata dalam mendukung dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Kemudian kegiatan wawancara selanjutnya mengunjungi di setiap lapak pedagang UMKM di Pantai Lawata dengan memberikan kuesioner yang berisi pertanyaan seputar usaha apa yang dijalankan, mulai beroperasi di tahun berapa, serta jenis dukungan yang di berikan oleh pemerintah kota.

Selain itu dalam melihat perkembangan perekonomian, peneliti juga mendatangi masyarakat sekitar Pantai Lawata bagaimana kebijakan tersebut benar-benar mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, yang di mana pengembangan ini tidak semata-mata hasil pengelolaan dari Dinas Pariwisata melainkan adanya kerja sama dengan kelompok pokdarwis sebagai penggerak dalam mewujudkan Pantai Lawata sebagai destinasi unggulan. Hasil penelitian ini juga berupa data primer yang sudah ada sehingga akan di akumulasi dengan hasil wawancara yang akan di olah hingga tahapan akhir yaitu penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Objek Daya Tarik wisata pantai Lawata menjadi salah satu upaya Dinas Pariwisata dalam memaksimalkan kebutuhan para wisatawan dan memperbaiki infrastruktur yang ada, sebab Pantai Lawata merupakan salah satu tempat wisata unggulan di Kota Bima. Oleh karena itu Dinas Pariwisata menerapkan kebijakan guna untuk mengembangkan daya Tarik wisata tersebut, yang di mana proses perumusan kebijakan ini sebagaimana yang menjadi acuan yaitu pada perda Kota Bima nomor 1 tahun 2023 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota Bima tahun 2022-2023. Pantai Lawata sudah menjadi salah satu tempat liburan terutama masyarakat yang tinggal di Kota Bima. Objek wisata Pantai Lawata merupakan sebuah pantai yang memiliki hamparan pemandangan yang berhadapan langsung dengan pulau kambing dengan di keliling oleh pegunungan hijau di sekitarnya, serta Pantai memiliki Goa jepang dan jembatan yang di bangun sejak zaman belanda.

Pantai lawata (gambar 1.1) sudah mulai di buka dari tahu 1960-an dengan kondisi pembangunan yang masih seadanya, Pantai Lawata menjadi tempat rekreasi yang menarik perhatian masyarakat lokal karena keindahan panorama lautnya yang dikelilingi oleh perbukitan. Meskipun sudah mulai dikunjungi sejak puluhan tahun yang lalu, kondisi pembangunan dan fasilitas di kawasan pantai masih sangat minim pada tahap awal pembukaannya. Infrastruktur seperti akses jalan, tempat istirahat, serta fasilitas pendukung lainnya belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Tidak ada fasilitas modern seperti tempat parkir yang luas, warung makan terorganisir, maupun area bermain. Pengelolaan wisata yang terbatas menyebabkan potensi wisata pantai ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian daerah.

Gambar 1.1 Objek wisata Pantai Lawata tahun 2016



Sumber : *Siswapedia, 2016*

Meskipun demikian, Pantai Lawata (gambar 1.2) tetap memiliki daya tarik alami yang kuat karena keindahan garis pantainya, air laut yang jernih, serta suasana alam yang tenang. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kota Bima bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Pokdarwis dalam pengembangan Objek Daya Tarik Pantai Lawata mulai menyadari pentingnya pengembangan potensi wisata dikarenakan Pantai Lawata yang setiap tahun angka kunjungannya meningkat. Saat ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas wisata agar Pantai Lawata dapat memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan menarik bagi para wisatawan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar 1.2 Objek wisata Pantai lawata sekarang



Sumber : *Dokumentasi Peneliti 2025*

Dalam pengembangan objek wisata Pantai Lawata Dinas Pariwisata mengeluarkan dua program utama yaitu meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal dengan indikator kinerja yaitu persentase peningkatan wisatawan yang berkunjung ke objek daya Tarik wisata Pantai Lawata dengan target 10 % begitu pun dengan program yang kedua presentasi nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina pada target 6,3 %. Penetapan program ini Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, penerima amanah adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bima, sedangkan pemberi amanah adalah Walikota Bima.

Berdasarkan skala penilaian perangkat kerja bahwa sasaran 1 masuk kategori berhasil. Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kota Bima perlu dengan perencanaan pembangunan di sektor kepariwisataan. Dalam hal ini, perencanaan yang terintegrasi terjadi apabila terdapat kesinambungan, keselarasan dan konsistensi setiap program- program pembangunan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari persentase pencapaian meningkat menjadi 28,81% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di kota Bima terutama wisatawan domestik mengalami kenaikan menjadi 14,53% dari tahun sebelumnya 11,28%. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ini karena adanya dampak langsung dari pembangunan sarana dan prasarana destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, beberapa destinasi itu adalah destinasi pantai lawata dan pantai Kolo. Untuk kedepannya akan dilakukan

penambahan destinasi-destinasi baru dan peningkatan sarana dan prasarana destinasi yang sudah ada serta memperbanyak event-event yang berdurasi sehari-hari yang mampu menarik wisatawan sehingga diharuskan untuk menginap atau tinggal sementara di Kota Bima (Dinbudpar kota bima, 2023)

Pengembangan destinasi wisata Pantai Lawata dapat memberikan berbagai manfaat, mulai dari peningkatan pendapatan daerah hingga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Namun, seperti halnya pengembangan destinasi wisata lainnya, langkah ini juga membawa tantangan dan dampak yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai aspek yang terlibat, termasuk dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi seiring upaya pengembangan Pantai Lawata sebagai tujuan wisata unggulan. Berikut uraian mengenai dampak positif dan negatif dari pengembangan Pantai Lawata:

a. Dampak Positif Destinasi Pantai Lawata

Objek daya Tarik wisata Pantai Lawata memiliki dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal seperti pemberdayaan usaha lokal, yaitu merupakan suatu aspek penting dalam pengembangan suatu pariwisata. Pantai Lawata sudah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi lokal, terutama dalam hal membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan. Hasil wawancara dengan para pelaku usaha Ibu Hasnah, ibu Nurlaila, ibu dewi, dan lainnya, masyarakat setempat memiliki peluang untuk berjualan seperti makanan berat, kopi, penyewa ban dsb. Sebelum di perbaharainya Pantai Lawata pendapatan masyarakat hanya berpatokan pada penghasilan suami bahkan tidak ada penghasilan/tidak bekerja hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dengan perkembangan/di perbaharainya Pantai Lawata bisa mencapai + 1 juta, mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Selain itu pemerintah memberikan dukungan berupa tempat penjualan untuk para pedagang dengan di bangun fasilitas seperti WC/Toilet telah memberikan kenyamanan untuk para wisatawan sehingga berdampak dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

b. Dampak Negatif Destinasi Pantai Lawata

Adanya perkembangan Pantai Lawata tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga membawa dampak negatif. Hasil yang peneliti temukan di lapangan masyarakat sekitar pantai Lawata menyebutkan adanya masalah sampah yang masih belum optimal, masih banyak sekali para pengunjung yang membuang sampah sembarangan sehingga berdampak pada ekosistem pantai dan laut di sekitar pantai Lawata yang di mana sampah plastik yang terbawa arus laut dapat mencemari perairan dan membahayakan kehidupan biota laut. Berdasarkan hasil observasi adanya pemandangan yang kotor sehingga berdampak pada nilai keindahan dan daya tarik pantai, yang pada akhirnya berdampak negatif pada tingkat kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat lokal.

Kesadaran lingkungan di Pantai Lawata masih perlu ditingkatkan melalui kombinasi kebijakan edukasi, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan penegakan aturan. Dengan demikian, pengembangan wisata tidak hanya akan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.

Pemerintah Kota Bima dalam hal ini Dinas Pariwisata telah menerapkan berbagai upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakat lokal salah satunya yaitu program pengembangan pantai Lawata. Di dalam pengembangan Pantai Lawata Dinas pariwisata membangun dan menyediakan Tempat Penjualan untuk Pedagang/UMKM atau area khusus yang representatif untuk pedagang lokal, bukan hanya itu menata lokasi pedagang agar lebih terorganisir, menarik, dan tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Peningkatan Fasilitas Penunjang Wisata serta Pembangunan penginapan yang ramah lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan bahkan Penyediaan tempat ibadah yang memadai serta mudah diakses oleh pengunjung dan membangun rumah makan dengan menu khas daerah untuk mendukung wisata kuliner lokal.

Berkembangnya Destinasi Pantai Lawata ini adanya kolaborasi dengan dibentuknya kelompok POKDARWIS yang sejauh ini cukup baik dan bisa berjalan lancar seperti pemerintah yang selalu menyediakan fasilitas-fasilitas yang di pantai Lawata kemudian masyarakat lokal selalu dukung pengembangan pantai Lawata dengan ikut serta mensosialisasikan atau mempromosinya untuk berkunjung ke pantai Lawata. Di sini pokdarwis memiliki peran dalam mewujudkan dan mengembangkan wisata khususnya objek wisata pantai Lawata, baik dalam hal sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona. Ada beberapa hal yang di lakukan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lawata, berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan adanya kolaborasi dengan pengusaha, petani, pengrajin, investor, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi, yang kedua Menggerakkan peran serta masyarakat sekitar pantai Lawata untuk mewujudkan

lingkungan yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memiliki kenangan, serta yang ketiga Mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang di sekitar pantai lawata untuk menjadi destinasi tujuan wisata.

Pengembangan wisata pantai lawata telah berdampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti adanya lapangan pekerjaan, mengurangi angka kemiskinan yang sebelumnya hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga bahkan tidak berpenghasilan. Temuan dari penelitian sebelumnya memaparkan bahwa adanya pengembangan objek wisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, tidak dipungkiri sebab akan memberikan suatu dampak bagi perekonomian masyarakat (Soeltanto et al., 2003).

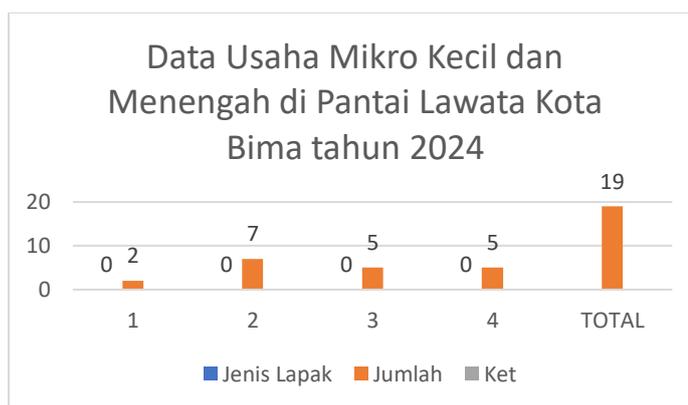
Dalam mengembangkan perekonomian masyarakat lokal melalui destinasi Pantai Lawata kebijakan pengembangan pengelolaan pantai lawata tersebut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pengunjung pada Objek Daya Tarik Pantai Lawata dengan upaya yang di pengaruhi oleh Pengelolaan Pantai Lawata secara baik, terutama masalah kebersihan dan ketersediaan air bersih hal ini dikarenakan Pantai Lawata adalah objek wisata keluarga yang dekat dengan pusat Kota Bima, baik itu di sediakan wahana yang menarik dan baru seperti Spot Foto, Banana Boat, Speed Hood, Cafe dan lain-lain. Kemudian terlihat banyaknya masyarakat yang terlibat aktif dan di berikan kesempatan untuk menggunakan sarana yang tersedia.

Hasil penelitian (Ilham zitri et al., 2020) di dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Sumbawa menerapkan pariwisata yang berbasis masyarakat (*community based tourism-CBT*) yang di mana penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata guna menciptakan dampak sosial-ekonomi yang positif. Namun, tantangan utama dalam penerapan CBT adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya dukungan infrastruktur dan kendala akses permodalan yang memadai. Sedangkan pada penelitian ini Dinas pariwisata sudah mampu memaksimalkan potensi pariwisata dengan pendekatan pada pemberdayaan masyarakat lokal, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat dalam mengelola produk dan layanan wisata sehingga peningkatan sumber daya manusia tersebut sudah pada tahap yang optimal.

a) Peluang Usaha

Peluang usaha berarti kemampuan individu untuk mencapai tujuan, baik finansial, keuntungan, maupun kekayaan, dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia untuk melancarkan suatu usaha. Beberapa kriteria harus dipenuhi oleh bisnis, kriterianya adalah sebagai berikut, Terdapat pertanyaan yang jelas, yaitu adanya kebutuhan yang belum terpenuhi atau yang menunjukkan bahwa konsumen mempunyai kemampuan membeli dan dapat melakukan pembelian. Pengembalian investasi atau pengembalian. Dengan kata lain dapat memberikan hasil dalam jangka waktu yang lama, cepat, dan tepat. Daya saing, atau kemampuan mengungguli produk atau jasa yang sudah ada di mata konsumen (Teguh et al., 2022).

Pantai Lawata memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di sekitarnya yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan , berikut Data jumlah UMKM di Pantai Lawata :



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bima 2024

Adanya wisata Pantai Lawata Memberikan dampak yang baik semenjak di perbaharuinya pantai, yang sebelumnya perekonomian masyarakat belum cukup stabil dan hanya berpatokan pada penghasilan suami tetapi setelah berjualan di sini memiliki pemasukan tambahan. Dari pihak pemerintah pun memberi dukungan seperti menyediakan tempat sehingga masyarakat lain juga bisa membuka usaha.

Dampak dari adanya wisata Pantai lawata dari sisi peluang masyarakat adalah membuka lapangan usaha bagi mereka. Dampak ini di rasakan oleh masyarakat pelaku usaha yang sebelumnya tidak bekerja atau sebagai ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan, juga masyarakat yang sebelumnya bekerja tapi melihat

peluang yang lebih baik di objek wisata Pantai Lawata. Berdasarkan hasil temuan lainnya oleh (Velani Nirmala Dapang & Agung Istri Putera Widiastiti, 2023) adanya peningkatan pendapatan masyarakat berdasarkan hasil wawancara terhadap ketua organisasi tenun (21 April, 2022) diketahui bahwa penjualan hasil tenun meningkat setelah tahun 2019 yaitu pada tahun-tahun sebelumnya penjualan tenun tidak stabil setiap bulannya, sedangkan sejak tahun 2019 terjadi peningkatan dengan rata-rata penjualan sebanyak 3 sampai 4 lembar per bulannya untuk setiap penenun

b)Tenaga Kerja

Kebijakan pengembangan pariwisata sering kali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui penciptaan lapangan kerja. Sektor pariwisata sendiri memiliki kontribusi penting dalam menciptakan lapangan kerja, terutama di kawasan yang memiliki daya tarik wisata unggulan seperti Pantai Lawata.



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bima 2024

Dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan pariwisata oleh pemerintah daerah, membawa dampak signifikan pada perkembangan tenaga kerja lokal dengan menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan keterampilan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sebelumnya tidak bekerja bahkan hanya menjadi ibu rumah Tangga tetapi penghasilan lebih dari sesudah bekerja di Pantai Lawata. Kajian penelitian oleh (Sutiarso, 2017) adanya pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan Menambah kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi masalah pengangguran Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.

b)Perkembangan Infrastruktur

Semenjak di perbaiki Pantai lawata telah mengalami perubahan dan pembaharuan hingga saat ini sehingga meningkatkan daya tarik para wisatawan dan kenyamanan, Salah satu dampak nyata dari kebijakan pariwisata adalah perbaikan akses jalan menuju Pantai Lawata. Pembangunan dan pelebaran jalan, penambahan rambu petunjuk arah, sehingga Aksesibilitas yang lebih baik meningkatkan kunjungan wisatawan dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Gambar 1.3 Rambu Petunjuk arah dan Ruang information



Sumber : Penelitian 2025

Selain itu Fasilitas umum seperti tempat parkir yang memadai, toilet umum, dan area bersantai merupakan infrastruktur yang penting untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Kebijakan pengembangan Pantai Lawata telah memprioritaskan penyediaan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata dan memperpanjang durasi kunjungan wisatawan.

Gambar 1.4 Tempat parkir di area pantai dan sekitar pintu masuk Pantai Lawata



Sumber : Dokumentasi peneliti, 2025

Secara keseluruhan, perkembangan infrastruktur di Pantai Lawata sebagai hasil dari kebijakan pariwisata telah memberikan dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah wisatawan dan peluang bisnis. Namun, perawatan dan pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan manfaat jangka panjang bagi komunitas setempat. Pada hasil penelitian (Salukh et al., 2023) dikarenakan jumlah angka kunjungan mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bersinergi untuk membangun pariwisata Labuan Bajo yaitu dengan faktor penting salah satunya yaitu fasilitas/infrastruktur untuk mendukung berwisata dari observasinya adanya tersedia fasilitas penginapan/hotel dapat mendorong wisatawan untuk datang berkunjung atau melakukan perjalanan wisata menuju daerah tujuan wisata. Di kota Labuan Bajo sudah tersedia fasilitas penginapan/hotel dengan berbagai jenis kelas baik hotel berbintang maupun non bintang yang terus bertambah setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 di Kabupaten Manggarai Barat khususnya Labuan Bajo terdapat 91 Usaha Akomodasi/Hotel, turun 27,03% dari tahun 2020. Dari 81 usaha akomodasi tersedia 1.966 kamar dan 4.047 tempat tidur di mana persentase kamar di Hotel Bintang sebesar 50,45%. Jumlah tamu yang menginap pada 81 hotel tersebut terdiri dari 5.686 orang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebanyak 133.426 orang selama tahun 2021

a) Proses (Input)

1. Sumber Daya Manusia

Pariwisata merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan manusia. Pada dasarnya pariwisata merupakan interaksi antara orang yang melakukan wisata sebagai konsumen (yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan wisata/wisatawan) dan orang yang melakukan wisata sebagai produsen (yaitu pelaku usaha yang menyediakan produk wisata) (Setiawan, 2016). Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan seluruh komponen pariwisata.

Dalam pengembangan objek wisata pantai lawata, sejauh ini kami sudah meluncurkan beberapa kebijakan salah satunya menyiapkan Sumber daya manusia yang baik dan dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mendukung pengelolaan secara profesional. Dalam hal pengawasan, melakukan metode tatap muka dari kebijakan yang sudah di luncurkan dengan melaksanakan kunjungan lapangan secara rutin untuk memantau para petugas, para pelapak dan menyapa para pengunjung sehingga bisa melihat secara langsung kondisi di sekitar objek wisata Pantai Lawata. Untuk meningkatkan peran serta partisipasi dalam pengembangan wisata Pantai Lawata adanya kolaborasi antara Pokdarwis, pemerintah, dan masyarakat sejauh ini cukup baik dan bisa berjalan lancar seperti pemerintah yang selalu menyediakan fasilitas-fasilitas yang di pantai lawata kemudian masyarakat lokal selalu dukung pengembangan pantai lawata dengan ikut serta mensosialisasikan atau mempromosinya untuk berkunjung ke pantai lawata.

Hasil kajian pada penelitian (Putra, 2020) di temukan adanya faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi lokal dalam pengembangan desa wisata Carangsari yaitu kurangnya sumber daya manusia dibidang pariwisata untuk kegiatan wisata lainnya seperti kemampuan mengelola akomodasi, selain itu belum adanya pemetaan produk unggulan desa wisata sehingga potensi lokal tidak terangkat, menjadikan masyarakat tidak menguasai daya tarik yang ditawarkan selama ini. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian saat ini menyoroti kondisi yang lebih positif terkait sumber daya manusia. Dengan jumlah tenaga kerja yang cukup dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan serta pendampingan, masyarakat desa kini lebih mampu mengelola potensi pariwisata secara profesional. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai memungkinkan pengelolaan yang lebih terstruktur, mulai dari perencanaan, pengelolaan fasilitas, hingga promosi wisata. Hal ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas jaringan pasar, dan menjamin keberlanjutan pengembangan pariwisata desa. Adanya perubahan ini menegaskan pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata berbasis komunitas.

Hal ini juga dalam penelitian (Negara et al., 2024) Potensi wisata di Pantai Medewi belum dimanfaatkan secara maksimal, yang disebabkan oleh keterbatasan keterampilan pengelolaan dari masyarakat setempat. Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk menarik wisatawan, sejalan dengan konsep pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, faktor jarak juga menjadi kendala bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Medewi, karena lokasinya relatif jauh dari objek-objek wisata populer di Bali.

Dalam mewujudkan pengembangan yang baik Dinas Pariwisata bekerja sama dengan pokdarwis khususnya pengembangan objek wisata pantai lawata, baik dalam hal sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona. Ada beberapa hal yang di lakukan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lawata seperti, Menjalin kolaborasi dengan pengusaha, petani, pengrajin, investor, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi, yang kedua Menggerakkan peran serta masyarakat sekitar pantai lawata untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan memiliki kenangan, serta yang ketiga Mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang di sekitar pantai lawata untuk menjadi destinasi tujuan wisata.

2. Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan program atau kegiatan dalam kebijakan pengembangan objek wisata ini, perlu adanya dana yang diperoleh pihak instansi yang terkait dari beberapa pihak. Dalam pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Pantai Lawata adanya dukungan dari pemerintah Kota Bima seperti yang setiap tahunnya menganggarkan dana yang berasal dari APBD Kota Bima melalui dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan rincian pada tahun 2022 sebanyak 2,9 M, Tahun 2023 sebanyak 13,1 M dan tahun 2024 sekitar 600 Jt.

Peran dari masyarakat yang bersedia membantu dalam bentuk terlibat langsung sebagai tenaga kerja di pantai lawata dan mengembangkan objek wisata sampai saat ini juga merupakan faktor pendukung yang sangat penting. Adanya pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari pemerintah Kota Bima serta peran seluruh masyarakat sekitar dalam mengelola pantai lawata. Hampir Semua masyarakat di sekitar juga terlibat di objek wisata, seperti para pemuda yang bekerja sebagai tenaga keamanan dan tenaga kebersihan di pantai lawata dan orang tua yang ikut peran serta sebagai pedagang pada sekitar area pantai lawata untuk memudahkan pengunjung. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti penginapan, gajebo, Tempat parkir, dermaga, mushola dan toilet yang ada di pantai lawata itu dibangun oleh pemerintah. Berdasarkan temuan terdahulu oleh (Suardika, 2020) menunjukan bahwa Desa Kerta telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk pengembangan desa wisata, pendapatan yang dihasilkan masih tergolong rendah dan belum sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan sehingga pendapatan dengan anggaran yang masuk tidak sebanding.

b) Hasil (Output)

1. Pendapatan Masyarakat Lokal

Dalam konteks kebijakan pengembangan pariwisata Pantai Lawata yang di luncurkan oleh Dinas Pariwisata, harapan utama masyarakat yaitu terciptanya peluang ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Namun, hasil penelitian yang di temukan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut justru belum memberikan dampak positif sepenuhnya kepada masyarakat. Akan tetapi, kebijakan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat lokal. Sebab penempatan lapak penjualan menjadi salah satu hambatan untuk masyarakat yang berjualan yang berpengaruh terhadap pemasukan. Dikarenakan lapak-lapak tersebut jauh dari pusat wisatawan dan hanya di pajang +- 1 tahun. Masyarakat lokal yang berjualan memaparkan kondisi ekonomi yang semakin menurun dengan pemasukan di hari biasa +- 100 ribu bahkan tidak ada sama sekali.

Ketidakseimbangan antara pembangunan untuk keperluan wisata dan kebutuhan dasar masyarakat membuat manfaat pariwisata lebih dirasakan oleh segelintir pihak daripada oleh seluruh komunitas. kebijakan pariwisata yang belum efektif ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya lokal untuk keberlangsungan hidup mereka. Dampak negatif tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemerintah daerah dan dinas pariwisata untuk menyusun strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar pariwisata. Pada hasil penelitian lain oleh (Mutaqin, 2023) adanya kesejahteraan terhadap ekonomi masyarakat akan tercapai dengan adanya Objek Wisata Kuliner Bulak Sawah diperlukan program dan kebijakan pemerintah desa yang benar-benar optimal dalam pembangunan tepat guna dalam aspek sumber daya manusia, sumber daya lingkungan, serta ekonomi. Sehingga dalam pengelolaan Objek Wisata Kuliner Bulak Sawah adanya peluang dalam pembangunan dan proses pemberdayaan untuk masyarakat kedepannya, dengan metode pemberdayaan itu sebagai dasar untuk mengambil suatu kebijakan dan berfokus terhadap potensi aset sumber daya yang ada.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas

Pengembangan pariwisata di Pantai Lawata telah menjadi salah satu fokus utama kebijakan pemerintah daerah. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung wisata yang diharapkan dapat memberikan pengalaman positif bagi pengunjung sekaligus meningkatkan potensi ekonomi lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak fasilitas yang belum memadai untuk mendukung pengelolaan destinasi ini secara optimal, namun yang harus diperbaiki yaitu fasilitas seperti toilet, karena banyak pengunjung yang mengeluh tidak kurangnya fasilitas toilet umum.

Selain itu, biaya Parkiran yang terlalu mahal (biaya masuk) dan tidak tertata dengan baik, sehingga para pengunjung bingung untuk menyimpan kendaraan khususnya sepeda motor. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas ini berdampak langsung pada kepuasan wisatawan. Banyak pengunjung yang mengeluhkan kondisi yang kurang nyaman, sehingga potensi mereka untuk kembali berkunjung atau merekomendasikan destinasi ini menjadi rendah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kunjungan yang secara tidak langsung memengaruhi pendapatan masyarakat lokal dan pemerintah daerah dari sektor pariwisata. Hasil temuan pada penelitian terdahulu (Sukabumi, 2023) di pondok nongko sendiri memiliki beberapa daya tarik wisata, salah satunya ialah Wisata Pantai Kedung Derus namun pada nyatanya untuk fasilitas pariwisata bisa di katakana tidak ada, Serta fasilitas akomodasi seperti homestay atau villa di desa pondok nongko masih belum tersedia sama sekali. Pada hakikatnya keterlibatan masyarakat sangat krusial dan mempengaruhi terhadap keberlangsungan desa wisata dan sangat berpotensi besar desa ini untuk memproduksi kerajinan kriya akan hasil alamnya seperti kelapa.

Dengan demikian pembangunan infrastruktur dan fasilitas di Pantai Lawata masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan dinas pariwisata. Untuk meningkatkan kualitas destinasi, sehingga tidak hanya menarik wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

3. Kerusakan Lingkungan

Salah satu aspek penting dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan adalah menjaga kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan sampah yang efektif. Pantai Lawata, sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bima, telah menjadi fokus dari berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan baik di kalangan pengunjung maupun masyarakat lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih belum sepenuhnya berhasil, ditandai dengan banyaknya pengunjung yang membuang sampah sembarangan.

Gambar 4.5 Pembuangan sampah sembarangan di Pantai Lawata



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Pengelolaan sampah yang masih belum optimal seperti banyak sekali sampah yang masih berserakan di sekitar objek wisata pantai lawata, Oleh karena itu masalah sampah ini penting untuk di perbaiki agar pengunjung nyaman untuk menikmati keindahannya. Tidak hanya itu penyediaan tempat sampah yang lebih besar /banyak agar setiap sudut ada untuk pembuangan sampah dan jika perlu memberikan sanksi kepada para pengunjung yang membuang sampah sembarangan dikarenakan dapat mencemarkan lingkungan serta menghilangkan ke estetikkan pantai.

Kebijakan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan melalui edukasi dan kampanye masih belum terlaksana secara maksimal. Kebiasaan membuang sampah sembarangan memiliki dampak langsung terhadap ekosistem pantai dan laut di sekitar Pantai Lawata sehingga sampah plastik yang terbawa arus laut dapat mencemari perairan dan membahayakan kehidupan biota laut. Selain itu, pemandangan yang kotor menurunkan daya tarik pantai, yang pada akhirnya berdampak negatif pada tingkat kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat lokal.

Kesadaran lingkungan di Pantai Lawata masih perlu ditingkatkan melalui kombinasi kebijakan edukasi, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan penegakan aturan. Dengan demikian, pengembangan wisata tidak hanya akan meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dampak pariwisata terhadap kesehatan lingkungan serta menerapkan langkah-langkah pengelolaan risiko guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Melalui kerja sama antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, masyarakat setempat, dan organisasi non-pemerintah, diharapkan dapat tercipta pariwisata yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat (Butarbutar et al., 2024).

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengembangan destinasi wisata Pantai Lawata memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal, meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Dampak positif dari kebijakan pariwisata di Pantai Lawata mencakup pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, serta pemberdayaan usaha lokal seperti pedagang makanan dan penyedia jasa wisata. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan juga turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal.

Namun, dampak negatif seperti masalah kebersihan dan pengelolaan sampah yang belum optimal mengurangi daya tarik destinasi tersebut dan dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan. Ketidakseimbangan antara pembangunan wisata dan kebutuhan dasar masyarakat lokal juga menjadi kendala dalam pemenuhan manfaat yang lebih merata bagi seluruh komunitas. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pariwisata memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, masih diperlukan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, infrastruktur, dan fasilitas untuk mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kebijakan pengembangan Pantai Lawata memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, namun hal ini memerlukan evaluasi lebih lanjut dan perbaikan dalam implementasi kebijakan untuk memastikan keberlanjutan serta pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Andrayani, Y., Nazwin, A. H., & Mataram, U. M. (2024). *Evaluasi Dampak Desa Wisata Terhadap Pertumbuhan*. 11, 539–547.
- Anggraeni, Y. A., & Romli, A. D. (2024). *Evaluation Of Tourism Management At Sedari Beach Attractions In Karawang District Evaluasi Pengelolaan Pariwisata Pada Objek Wisata Pantai Sedari Kabupaten Karawang*. 5(2), 5736–5743.
- Arisa, I. (2019). Kebijakan Pemerintah Aceh Tengah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 4, 1–15. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/10194>
- Bima, D. pariwisata kota. (n.d.). *Data Kunjungan Wisatawan Di pantai lawata*.
- Butarbutar, A. R., Dewi, R. D. L. P., Farida, D., Jayadi, A., Sitopu, J. W., Uhai, S., & Mutmainnah, I. (2024). Evaluasi Dampak Pariwisata Terhadap Kesehatan Lingkungan Dan Upaya Pengelolaan Risiko. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 4947–4954.
- Dinbudpar kota bima. (2023). laporan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota bima. *Dinbudpar Kota Bima*.
- Hidayat, R., Awaluddin, M., & Candra, C. (2019). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di NTB (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi NTB No.2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(2), 85. <https://doi.org/10.31764/jiap.v6i2.645>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2020). *131801002_File 5*. 8–51.
- Ilham zitri, Yudhi Lestanata, & Inka Nusamuda Pratama. (2020). Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 3(2), 99–113. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i2.1531>
- Indraningsih, G. . K. A. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kota Palu. *Jurnal Pariwisata PaRAMA : Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.36417/jpp.v1i1.257>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Mutaqin, I. (2023). *Dampak objek wisata kuliner Bulak Sawah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat*. 10(November 2024), 61–82. <https://digilib.uinsgd.ac.id/72132/>
- Nasional, S., Snpk, K., Pratiwi, R., & Ruspianda, R. (2006). *TANTANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS : OBJEK WISATA PEMANDIAN AIR PANAS DESA SUNGAI PINANG) Universitas Islam Kuantan Singingi , Kuantan Singingi upaya mewujudkan desa yang mandiri . Melalui program ini setiap desa da*. 132–144.
- Negara, I. D. M. K. S., Negara, F., & Sari, R. J. (2024). Evaluasi Peluang dan Hambatan dalam Mengelola Destinasi Wisata Pantai dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Dan Bisnis*, 3(7), 1169–1178. <https://doi.org/10.22334/paris.v3i7.833>
- Oktaviani, A. B., & Yuliani, E. (2023). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jkr.v3i1.22574>
- Permitasari, D. (2019). Evaluasi Efektivitas Program dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kota Magelang. *Digilib Uns*, 11(2), 14–15.
- Presiden Republik Indonesia. (1945). *Dasar, Pembukaan Undang-undang Tahun, Indonesia*.
- Putra, D. P. B. P. (2020). Pengembangan Desa Wisata Carangsari Dan Partisipasi Masyarakat Lokal. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(2), 1–15. <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.838>
- Rahmi, S. A. (2016). Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal. *Reformasi*, 6(1), 76–84. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/679%0Ahttps://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/679/658>
- Salukh, J. Y., Pandie, D. B. W., & Fanggidae, A. H. J. (2023). Analisis Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Super Prioritas Berkelanjutan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 191–214. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8205683>
- Setiawan, I. R. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan*, 1(1), 24. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Soeltanto, T., Laila, N., & Hartono, Y. (2003). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pemandian Alam Banyu Biru Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal. *Akses : Journal of Publik & Business Administration Science*, 5(1), 35–41. <https://doi.org/10.58535/jasm.v5i1.36>
- Sri Ernawati, Intisari Haryanti, & Ita Purnamasari. (2023). Strategi Pengembangan Industri Wisata Di Kota

- Bima. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 2, 157–162. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol2.2023.113>
- Suardika, I. P. A. (2020). Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 145–151.
- Sukabumi, C. K. (2023). *Jurnal pariwisata prima*. September.
- Sutiarso, M. A. (2017). Sustainable Tourism Development Through Ecotourism. *OSFPreprint*, September, 1–11.
- Suwandi, A. K., & Haryati, E. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(3), 615–624.
- Teguh, M., Harunnurasyid, H., Hidayat, A., Imelda, I., Kartasari, S. F., & Liliana, L. (2022). Pelatihan Kewirausahaan dan Perencanaan Usaha Masyarakat di Desa Ulak Kembahang II, Pemulutan Barat, Sumatera Selatan. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 3(2), 129–138. <https://doi.org/10.29259/jscs.v3i2.86>
- Velani Nirmala Dapang, I., & Agung Istri Putera Widiastiti, A. (2023). The Impact of Tourism Development on the Economy of the Village Community. *Jurnal Pariwisata Dan Bisnis*, 02(10), 2356–2365. <https://dx.doi.org/10.22334/paris.v2i10>
- منار على محمد, م. ص. ف. (2022). الاكتساب اللغوي (1) وعلاقته بتقدير الذات (2) لدى أطفال الروضة المصابين بطيف التوحد (3) وأقرانهم العاديين. *1(10)*, 52–1. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>